



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PADANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHYELDI
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 41824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.887.000.000

1. Tanah Seluas 677 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 270.800.000
2. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.400.000
3. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.800.000
4. Tanah Seluas 569 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 284.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
6. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 217.000.000
7. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.500.000
8. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
9. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 158.400.000
10. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 129.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 286.400.000



1. MOBIL, KIJANG INNOVA G'TOYOTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T SEPEDA MOTOR SOLO
Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
138.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	841.909.791
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	911.038.720
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	4.951.348.511
III. HUTANG	Rp.	2.374.435.157
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.576.913.354

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.